
KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 1948-1949

Ega Saputri Wulandari
Jurusan Pendidikan Sejarah FIS Universitas Negeri Manado
Email: egasaputri907@gmail.com

Article History

Received : 2021-11-08 Accepted : 2021-06-13 Published : 2021-12-27

Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk, menjelaskan keadaan ekonomi Indonesia setelah terjadi Agresi Militer Belanda dan menjelaskan kebijakan ekonomi Indonesia pada tahun 1948-1949. Penelitian ini menggunakan pendekatan “strukturisme”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan strukturalistik dengan metode sejarah menurut Marc Bloch sebagai metode penelitian. Ekonomi Indonesia diawal kemerdekaan sangatlah kacau, pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam memperbaiki ekonomi Indonesia, akibat dari lambatnya pemulihan tersebut maka tidak mengherankan inflasi terus berlanjut dari masa perang dan revolusi, ditambah lagi blokade yang dilakukan Belanda semakin memperparah perekonomian Indonesia. Dan keadaan ekonomi Indonesia semakin parah setelah Belanda melancarkan Agresi Militer, dimana Belanda berhasil menguasai wilayah penting di Indonesia, yaitu seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Dampak dari Agresi Militer ini sangat nyata dirasakan oleh Indonesia, bahkan masyarakat sampai menggunakan pakaian dari bahan kain goni, dan juga gaji para pegawai rendah hanya 70 sampai 160 rupiah perbulannya. Maka dari itu pemerintah Indonesia, dalam hal ini mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi Indonesia. Dengan tujuan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia dan mensejahterakan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : *Kebijakan, Ekonomi, Indonesia, Tahun 1948-1949*

INDONESIAN ECONOMIC POLICY IN 1948-1949

Ega Saputri Wulandari
Jurusan Pendidikan Sejarah FIS Universitas Negeri Manado
Email: egasaputri907@gmail.com

Abstract- This research is intended to reveal Indonesian economy after the Military Aggression and Indonesia's economic policy in 1948-1949. In conducting this research, the researcher used structuralism approach. Structuralism approach argues that history is created because of the "thoughts" and "actions" of humans (ratio and action). The researcher used historical method by Marc Bloch, namely: First, Doing historical observations about Indonesia's economic policies in 1948-1949; second, conducting a historical critique or testing of data on Indonesia's economic policies in 1948-1949; third, generalizing funds or categorizing data based on the problems in this research, namely Indonesia's economic policies in 1948-1949; and fourth, conducting a causal search (analysis) of the problems written, namely those related to Indonesia's economic policies in 1948-1949. At the beginning of independence, The Indonesian economy was in shambles. The government encountered difficulties in improving the Indonesian economy; as a result of the slow recovery, it is not surprising that inflation from the war and revolution persisted, and the Dutch blockade exacerbated the Indonesian economy further. Indonesia's economic situation deteriorated after the Dutch launched Military Aggression, during it gained control of key areas in Indonesia, including West Java, East Java, and Sumatera. The

impact of this military aggression is clearly felt in Indonesia, where people wear burlap clothing and low-wage employees earn only 70 to 160 rupiah per month. As a result, the Indonesian government issued a number of policies in order to address the country's economic problems. With the goal of improving the Indonesian economy and people's well-being.

Keywords: *Policy, Economy, Indonesia, Year 1948-1949*

Pendahuluan

Setelah Indonesia merdeka secara *de facto* dan *de jure*, maka Indonesia menjadi negara yang independen, negara yang seharusnya berdiri sendiri tanpa pengaruh dan pengawasan dari pihak lain terutama penjajah. Oleh karena itu bangsa Indonesia harus dapat mengatur kehidupannya sendiri tanpa ada pengaturan dari negara lain, karena itu sejak Indonesia merdeka, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai ideologi dan dasar hidup bernegara dan berbangsa bagi seluruh rakyatnya.

Ekonomi menjadi salah satu aspek yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebagai pemimpin masyarakat diharuskan dapat merumuskan kebijakan yang menjamin kehidupan rakyatnya agar dapat berjalan dengan baik. Indonesia sebagai sebuah negara yang baru merdeka memiliki sejarah panjang tentang pembangunan ekonomi.

Perekonomian juga merupakan fondasi dari kehidupan suatu negara. Ketika ekonomi suatu negara bertumbuh secara positif, maka ada jaminan kehidupan rakyat yang makmur dan sejahtera. Sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi melaju secara negatif. Artinya ekonomi negara tersebut mengalami keterpurukan bahkan runtuh. Akibatnya, tidak ada jaminan kemakmuran dan kesejahteraan bagi kehidupan rakyatnya.

Pada tahun-tahun pertama setelah merdeka. Semua sektor kemasyarakatan menderita sampai tingkat tertentu akibat kenaikan harga. Sehingga kemerdekaan tidak menghasilkan kemakmuran yang diharapkan oleh banyak orang. Semua ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, yang penting di antaranya adalah pendudukan Jepang, Perang Dunia II, Perang Revolusi, dan manajemen ekonomi makro yang sangat buruk.

Perkembangan pembangunan ekonomi mempunyai pola dan proses dinamika di suatu negara sangat ditentukan oleh banyak faktor, baik internal (domestik) maupun eksternal (internasional). Faktor-faktor internal di antaranya adalah kondisi fisik (termasuk iklim), lokasi geografi, jumlah dan kualitas sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki, kondisi awal ekonomi, serta peranan pemerintah di dalam ekonomi.

Faktor eksternal yang mempengaruhi diantaranya adalah perkembangan teknologi, kondisi perekonomian dan politik dunia, serta keamanan global. Kedua faktor tersebut dapat menyebabkan terjadi kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi maupun kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Proses pergantian pemerintahan dari kolonial ke republik menimbulkan gejolak disemua aspek kehidupan bernegara. Ancaman baik dari luar ataupun dari dalam negeri sewaktu-waktu dapat menggulingkan pemerintahan yang sah. Hal tersebut semakin memperparah kondisi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Secara umum, pada waktu itu kemerdekaan belum memiliki dampak apapun terhadap kemakmuran bangsa (M.C. Ricklefs, 2007).

Kolonialisme turut menumbuhkan kesadaran bahwa tanah yang dieksploitasi oleh penjajah dipergunakan untuk kesejahteraan kolonial (penjajah) dan bukan untuk tanah yang dijajah. Tumbuhnya kesadaran tersebut merupakan bagian dari rasa nasionalisme berbangsa. Saat nasionalisme menemukan bentuknya dalam negara bangsa, republik pascaproklamasi kemerdekaan Indonesia 1945 ternyata tidak mudah melepaskan diri dari cengkeraman kepentingan ekonomi barat. Kedaulatan negara masih terancam, meskipun perlawanan heroik dengan bambu runcing mampu mengusir penjajah, tetapi belum cukup mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur seperti yang tertuang dalam UUD 1945 (Waskito W. Wardodjo, 2018).

Kondisi perekonomian Indonesia semakin parah, saat Belanda melancarkan Agresi Militer, dimana tujuan utama agresi Belanda adalah merebut daerah-daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki sumber daya alam, terutama minyak. Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi militer I. Setelah berakhirnya Agresi Militer I, Belanda kembali menyerang Indonesia dengan melancarkan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948.

Adanya Agresi Militer ke-II akibat ketidakpuasan Belanda dari persetujuan Renville yang dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan tanggal 17 Januari 1948. Menurut bangsa Indonesia

perundingan Renville itu jelas sangat merugikan. Karena isi perjanjian tersebut menempatkan Republik Indonesia kepada kedudukan yang makin bertambah sulit. Wilayah Republik Indonesia makin sempit, sebab dikurung oleh daerah-daerah kedudukan Belanda. Tapi untuk selanjutnya bahwa Belanda selalu berpendapat untuk memojokkan bangsa Indonesia. Para pembesar Republik Indonesia sering kali melanggar ketentuan-ketentuan perjanjian gencatan senjata. Menurut Belanda bahwa pelanggaran tersebut sesuai dengan perintah-perintah para komandan tentara kepada orang-orang Indonesia yang berada di daerah-daerah yang dikuasai Belanda (H. Kuswandi, 2015).

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan “stukturisme”. Pendekatan strukturisme adalah pendekatan yang menggabungkan pendekatan peristiwa (event) dengan pendekatan struktural. Karena eksplanasi sejarah dari aspek peristiwa tidak bermakna tanpa ditampilkan struktur-struktur dan determinan-determinan lainnya yang terkandung di dalamnya. Asumsinya bahwa dalam historiografi ditampilkan perubahan dan diskontinuitas dalam bentuk peristiwa, sedangkan struktur sebagai aspek kontinuitasnya. Pendekatan strukturisme, dipandukan dasar-dasar dari pendekatan peristiwa dengan dasar-dasar dari struktural yakni hal-hal unik (peristiwa) dengan hal-hal yang unversal (struktur sosial). Selain itu, di manfaatkan juga hermeneutika untuk menjelaskan causal faktor (Christopher Lloyd, 1993).

Metode yang digunakan dalam penelitian dan analisis data penelitian ini adalah metode sejarah menurut March Bloch. Empat tahap yang dilakukan dalam metode ini, yakni: pertama, melakukan observasi historis tentang kebijakan ekonomi Indonesia pada tahun 1948-1949; kedua, melakukan kritik sejarah atau pengujian data, dengan membandingkan keterangan yang diperoleh tentang kebijakan ekonomi Indonesia pada tahun 1948-1949; ketiga, melakukan generalisasi dan atau kategorisasi data sesuai permasalahan dalam penelitian ini, yaitu kebijakan ekonomi Indonesia pada tahun 1948-1949; dan keempat, melakukan pencarian (analisis) sebab-akibat

dari masalah yang ditulis (March Bloch, 1988), yakni berkaitan dengan kebijakan ekonomi Indonesia pada tahun 1948-1949.

Hasil dan Pembahasan

Keadaan Ekonomi Indonesia Pasca Kemerdekaan

Sejarah bangsa Indonesia pasca Kemerdekaan sangat buruk, bahkan bisa dikatakan pemerintah belum bisa menyanggah perekonomian yang terpuruk, dan ironisnya malah menambah kegagalan perkembangan ekonomi pada saat masa-masa tersebut. Dengan lambannya pemulihan ekonomi dan meluasnya pengeluaran pemerintah, maka tidaklah mengherankan bahwa inflansi dari masa perang dan revolusi terus berlanjut. Semua sektor kemasyarakatan menderita sampai tingkat tertentu akibat kenaikan harga. Sehingga kemerdekaan tidak menghasilkan kemakmuran yang diharapkan oleh banyak orang (M. C. Ricklefs, 2007). Masyarakat Indonesia yang seharusnya merasakan kegembiraan dan kemakmuran setelah merdeka, namun justru menerima keadaan yang berbanding terbalik dengan yang mereka harapkan.

Hiper inflasi menimpa negara Republik Indonesia yang baru berumur beberapa bulan itu bersumber dari beredarnya mata uang rupiah Jepang secara tidak terkendali. Pemerintah tidak sanggup mengontrol mata uang asing yang beredar di Indonesia, terutama mata uang Jepang dan mata uang Belanda, keadaan kas negara dan cukai dalam keadaan nihil, begitu juga dengan pajak, kas pemerintah kosong, pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah. Untuk sementara waktu kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah adalah mengeluarkan penetapan yang menyatakan berlakunya beberapa mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI. Yang dinyatakan berlaku adalah tiga macam mata uang yaitu mata uang de Javanese Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Sebagai akibat dari adanya inflasi, yang paling menderita adalah petani, karena pada zaman pendudukan Jepang petani adalah produsen yang paling banyak menyimpan dan memiliki mata uang Jepang. Selain itu adanya blokade Belanda yang menutup pintu keluar masuk

perdagangan RI yang mengakibatkan barang-barang dagangan pemerintah RI tidak dapat diekspor.

Dengan adanya blokade, Belanda mengharapkan agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan dan supaya terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia, sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya. Untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda, timbulnya keadaan sosial ekonomi yang buruk dan kekurangan barang impor yang sangat dibutuhkan. Dan memang perbendaharaan kosong, sedangkan pengeluarannya semakin bertambah besar, bahkan penghasilan pemerintah hanya menggunakan hasil produksi pertanian, karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk. Pihak Belanda pun memperhitungkan bahwa RI secara ekonomi akan segera ambruk. Dan juga pasca proklamasi ini mengakibatkan banyak sekali terjadi perubahan sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada khususnya. Dikarenakan sebelum kemerdekaan di proklamirkan, di dalam kehidupan bangsa Indonesia telah terjadi diskriminasi rasial dengan membagi kelas-kelas dalam masyarakat. Warga pribumi tergolong masyarakat rendah yang kebanyakan hanya menjadi budak dari bangsawan atau penguasa, ini terjadi karena masyarakat Indonesia sebelum merdeka didominasi oleh warga eropa dan Jepang.

Keadaan Ekonomi Indonesia Akibat Agresi Militer

Agresi militer I yang dilakukan Belanda, itu sangat berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia, dimana Belanda berhasil menguasai daerah-daerah penting Indonesia seperti daerah perkebunan di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat dan Jawa Timur sehingganya membuat persediaan atau stok pangan menjadi kurang dan akibat dari itu menimbulkan kerugian untuk Indonesia. Ditambah lagi serangan yang dilakukan Belanda membuat Indonesia mengalami kerugian yang besar secara ekonomi dikarenakan banyak bangunan rumah

warga serta bangunan fasilitas sosial, pendidikan, dan bangunan yang lain yang ikut hancur, serta pengeluaran biaya perang.

Setelah gencatan senjata, Belanda dan Indonesia melakukan perundingan damai yaitu Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Isi persetujuan Renville pada intinya sama dengan Persetujuan Linggarjati yang di fasilitasi Inggris, yaitu pengakuan secara de facto terhadap Indonesia di Jawa, Madura, dan Sumatera serta rencana pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS). Persetujuan Renville menetapkan wilayah yang masuk Indonesia, dan wilayah dari negara federal bentukan Belanda. Batas-batas baru yang ditetapkan itu sangat merugikan Indonesia tentunya, karena beberapa wilayah di Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera dan daerah-daerah yang diserang dan dikuasai oleh Belanda sejak Agresi I dinyatakan sebagai wilayah kekuasaan Belanda. Hal ini secara ekonomi sangat merugikan Indonesia, karena daerah yang dikuasai oleh Belanda merupakan daerah penghasil utama pertanian seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan Indonesia mendapatkan bagian tengah pulau Jawa yang merupakan daerah padat penduduk dan kekurangan beras, dimana penderitaan semakin meningkat akibat dari blokade Belanda serta masuknya sekitar enam juta lebih pengungsi dan tentara Republik. Oleh karena itu pemerintah mencetak banyak uang lagi untuk menutup biaya dan inflasi pun melonjak (M.C. Ricklefs, 2008).

Bahkan Belum pulih kembali Indonesia dari Agresi Militer I, Belanda kembali melancarkan Agresi Militer II yang jaraknya kurang lebih 1 tahun 5 bulan setelah Agresi Militer I yaitu pada tanggal 19 Desember 1948 dengan tujuan untuk menghancurkan Republik Indonesia, menguasai ibukota sementara Indonesia yang saat itu berada di Yogyakarta dan menangkap pemimpin-pemimpin pemerintahan Indonesia. Terhitung sejak tanggal 19 Desember 1948 sampai dengan tanggal 30 Juni 1949 kerugian yang diderita rakyat meliputi korban jiwa, menderita luka-luka, orang hilang dan kerugian benda. Dimana kerugian benda milik rakyat sejumlah Rp. 252.684.430 (Kementrian Penerangan, 1953).

Indonesia mengalami masa-masa sulit akibat Agresi militer yang dilakukan oleh Belanda, sampai megakibatkan beribu-ribu

orang Jawa melarikan diri membawa harta benda mereka yang dapat dibawa. Bahkan menurut kesaksian kahin yang pernah datang ke Indonesia pada tahun 1948 menyaksikan kondisi ekonomi pada saat itu membuat masyarakat kota dan desa masih menggunakan pakaian yang terbuat dari kain goni, dimana gaji pegawai negeri rendah hanya 70 sampai 160 rupiah per bulannya, bahkan Koesoemah Atmadja seorang kepala Pengadilan Tertinggi yang mempunyai gaji 700 rupiah sebulan tidak mampu menafkahi anaknya, sehingga anaknya mengalami kebutaan disebabkan kekurangan gizi (Kahin, G. M. T, 2013). Dari awal kemerdekaan pun Indonesia sudah merasakan masa-masa sulit terkait ekonomi, dimana terjadi inflasi yang sangat tinggi, adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945. Ditambah lagi Agresi Militer yang di lakukan juga oleh Belanda, menambah penderitaan masyarakat Indonesia pada saat itu.

Kebijakan Menteri Kemakmuran tahun 1948

Pada awal tahun 1948 keadaan perekonomian rakyat di daerah Republik Indonesia sangat buruk sekali. Agresi Militer Belanda mengakibatkan berbagai daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti daerah perkebunan, kawasan industri dan pelabuhan jatuh ketangan Belanda. Blokade ekonomi atas daerah perairan yang dikuasai Republik Indonesia mengakibatkan lumpuhnya kegiatan perdagangan dan sulitnya pemasukan uang ke kas negara.

Menghadapi situasi yang demikian, Sjafruddin Prawiranegara sebagai Menteri Kemakmuran melakukan usaha-usaha seperti membuat kebijakan fiskal, untuk menguraikan kebijakan sebagai kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Dimana pada saat itu menteri kemakmuran mengeluarkan Peraturan yang bersifat kebijakan fiksial antara lain dengan mengeluarkan peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1948 pada tanggal 22 Maret 1948 tentang pengumpulan bahan makanan rakyat oleh pemerintah. Peraturan ini dimaksudkan untuk menjaga yang cenderung semakin menipis dan terjadi pula pemindahan bahan makanan ke daerah pendudukan Belanda. Pada tanggal 9 Juli 1948 ditetapkan Peraturan Pemerintah nomor 15 untuk

menghitung ternak berupa kuda, kerbau, kambing, domba dan sapi. Peraturan ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa untuk memajukan perekonomian perlulah diketahui jumlah ternak yang sebenarnya yang ada di seluruh daerah Republik. Data statistik tersebut dapat dijadikan dasar rencana pekerjaan dalam pembangunan, baik dalam lapangan peternakan, lapangan pertanian maupun lapangan perekonomian rakyat pada umumnya. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1948 tentang pemberantasan penimbunan barang-barang penting seperti beras, gabah, padi, menir, tepung beras, gula, minyak tanah, jagung, galek, tapioka, garam, kopi dan teh. Peraturan ini ditetapkan untuk memberantas penimbunan bahan makanan penting supaya peredaran barang-barang tersebut berjalan lancar. Berdasarkan peraturan ini, siapa pun yang bukan pedagang atau petani dilarang mempunyai atau menyimpan bahan makanan lebih daripada yang diperlukan buat pemakaian sendiri. Sedangkan para petani hanya boleh mempunyai sebanyak-banyaknya sejumlah hasil usahanya selama musim panen dan dua bulan berikutnya (Ajip Rosidi, 2011).

Namun berbeda dengan para pedagang bahan makanan yang melayani keperluan pemerintah, mereka diberi izin untuk mempunyai atau menyimpan bahan makanan melebihi ketentuan tersebut, asalkan saja terlebih dahulu mendapat surat izin dari Kepala Jawatan Persediaan dan Pembagian Bahan Makanan (PPBM) Pusat atau pejabat lain yang ditunjuknya. Hal ini diatur oleh pemerintah nomor 20 tahun 1948 tertanggal 3 September 1948.

Program lain Kementerian Kemakmuran yang lain adalah memberikan kepada rakyat kesempatan yang sepenuh-penuhnya untuk berusaha sendiri. Caranya ialah dengan melakukan propaganda dan mencetak berbagai buku tentang pembuatan bermacam-macam barang keperluan hidup sehari-hari, seperti sabun, gelas, sikat gigi, dan sebagainya. Selain itu Mengadakan transmigrasi besar-besaran ke Sumatra, dilaksanakan penggalian waduk-waduk dan memperbaiki usaha irigasi yang sudah ada, serta pembesaran produksi.

Kebijakan Menteri Keuangan Tahun 1949

Pada tanggal 16 Desember 1949 dilakukan pemilihan presiden RIS yang pertama oleh

wakil-wakil negara bagian dan wakil Republik Indonesia. Ir. Soekarno terpilih secara bulat sebagai presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama. Pada tanggal 21 Desember 1949, Mohammad Hatta sebagai Perdana Menteri mengumumkan kabinetnya, yang merupakan kabinet pertama bagi Republik Indonesia Serikat (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993). Di dalam kabinet Republik Indonesia Serikat, Sjafruddin Prawiranegara duduk sebagai Menteri Keuangan. Tugas Menteri Keuangan, memperbaiki keadaan ekonomi rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan; mengadakan persiapan untuk jaminan sosial dan penempatan tenaga kembali ke dalam masyarakat; mengadakan peraturan tentang upah minimum; pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan terwujud kepada kemakmuran rakyat seluruhnya.

Semua masalah yang bertimbulk merupakan tantangan untuk Sjafruddin sebagai Menteri Keuangan. Masalah pokok ekonomi yang dihadapi ialah karena produksi yang rendah, banyaknya mesin yang rusak, perkebunan yang tidak terpelihara, jalan yang tidak dapat dilalui, transportasi yang buruk, pegawai yang terlalu banyak ditambah pula oleh adanya masalah kepegawaian kembar, penyelundupan, dan lain-lain. Bagi Menteri Keuangan RIS tidak dibatasinya kebebasan dalam langkah-langkah persetujuan KMB dalam bidang keuangan telah mengikat langkah-langkahnya. Seperti penentuan langkah-langkah kebijaksanaan devisa, bahkan pengangkatan Presiden dan para Direktur Bank Sirkulasi itu pun hanya dapat dilakukan setelah mengadakan perundingan dengan Belanda. Begitu pula lalu lintas pembayaran antara Indonesia dengan negara-negara luar hampir seluruhnya harus disalurkan melalui negeri Belanda.

Pada tanggal 11 Maret 1950 dikeluarkanlah peraturan oleh Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (yang mulai berlaku tanggal 13 Maret 1950) untuk memperbaiki perkembangan neraca pembayaran dengan memakai sistem Sertifikat Devisa. Tanpa melakukan perubahan kurs resmi rupiah

terhadap mata uang asing, peraturan itu menetapkan kurs efektif bagi pembelian dan penjualan devisa orang yang berbeda. Orang-orang yang mengekspor barang dari Indonesia, selain memperoleh uang sebanyak harga barang-barangnya dalam rupiah Indonesia, juga memperoleh Sertifikat Devisa sebesar 50% dari harga barang yang diekspornya itu (Beng To Oey, 1991).

Peraturan Sertifikat Devisa kemudian disusun dengan Putusan Menteri Keuangan Republik Indonesia sekitar tanggal 19 Maret 1950 tentang "Operasi Gunting Sjafruddin" karena sebagai Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara mengambil keputusan untuk memotong dua dengan gunting uang merah dengan uang de Javasche Bank dari pecahan Rp 5 ke atas. Pecahan Rp 2,50 dan yang lebih kecil tidak mengalami pengguntingan. Uang ORI juga tidak digunting. Keputusan ini menembak beberapa sasaran: pengganti uang yang bermacam-macam itu dengan mata uang baru, mengurangi jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi dengan demikian menurunkan harga barang, mengisi kas pemerintah dengan pinjaman wajib. Pengguntingan uang pada tanggal 19 Maret 1950 dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.PU/1 tanggal 19 Maret 1950 terhadap uang kertas De Javasche Bank dan uang pendudukan Belanda (J. D. Parera, 2005).

Secara umum 2 kebijakan yang di keluarkan Menteri Keuangan itu mencapai sasaran, ekspor dalam bulan April dan Mei memperlihatkan peningkatan yang mencolok dibandingkan dengan bulan Januari 1950. Harga-harga barang, terutama bahan makanan pokok seperti beras, tidak naik. Pengguntingan uang juga membawa pengaruh baik, dan peraturan devisa pun begitu juga. Walaupun sayangnya usaha Sjafruddin agaknya tidak berhasil untuk menekan anggaran belanja negara yang membengkak, sehingga pada akhir tahun 1950, masih terdapat defisit sebesar Rp. 1.736 juta, lebih sedikit daripada defisit yang diperkirakan Rp. 2,65 milyar, tetapi lebih besar dari pada yang diharapkan setelah melakukan pinjaman wajib dan mengeluarkan sertifikat devisa. Hal ini disebabkan karena pengeluaran negara meningkat hampir dua kali lipat. Namun bagaimanapun kebijakan Sertifikat Devisa dan "gunting Sjafruddin" yang di keluarkan

Menteri Keuangan itu telah berhasil memasukan uang kepada pemerintah. Sehingga pemerintah dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya (Ajip Rosidi, 2011,).

Ada beberapa faedah yang dapat dicapai dengan peraturan yang dikeluarkan Sjafruddin, ialah: a. Merupakan cambukkan bagi masyarakat untuk bekerja lebih keras. Dengan dikurangnya peredaran uang, bisa diharapkan bahwa harga-harga barang tentu akan turun, sedangkan upah-upah akan tetap sebagaimana biasa; b. Kekacauan dalam soal uang, yang juga merupakan salah satu sebab kurang lancarnya perekonomian, akan lenyap. Juga ORI baik di Jawa maupun Sumatra akan bersama-sama ditarik dari peredaran. Uang federal yang lama akan lenyap pada tanggal 17 April, uang ORI pada tanggal 1 Mei 1950; c. Kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia dalam masalah-masalah keuangan dan perekonomian akan bertambah besar, sehingga kemungkinan untuk mendapat kredit atas dasar-dasar yang sehat akan menjadi lebih besar lagi. Dunia luar akan melihat, bahwa Indonesia dengan kekuatan sendiri, dengan tidak menggantungkan nasibnya pada belaskasihan diri negara-negara asing, benar-benar sanggup menyelesaikan soal-soalnya sendiri. Dengan sendirinya kedudukan politik Indonesia akan kuat.

Simpulan

Berdasarkan penjabaran dalam penelitian diatas maka kesimpulan penelitian sebagai berikut :

1. Pemerintah Indonesia dalam menghadapi situasi ekonomi yang ada di tahun 1948-1949 melakukan berbagai upaya dalam perbaikan ekonomi melalui kementerian kemakmuran yang dipegang oleh Sjafruddin Prawiranegara dengan melakukan usaha-usaha antara lain yaitu : mengeluarkan peraturan pemerintah No 5 tahun 1948 tentang pengumpulan bahan makanan rakyat oleh pemerintah, menetapkan peraturan pemerintah pada tanggal 9 Juli No 15 tahun 1948 untuk menghitung ternak yang ada di Indonesia sebagai acuan untuk memajukan perekonomian, mengeluarkan peraturan No 29 tahun 1948 tentang pemberantasan penimbunan barang-barang penting berupa makanan supaya barang-barang tersebut bisa berjalan dengan lancar, kemudian pada tahun 1949 Sjafruddin menjabat sebagai Menteri Keuangan dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Sertifikat Devisa dan Operasi Gunting Uang Sjafruddin

pada tahun 1950. Dan juga Pemerintah Indonesia disisi lain dalam meyelamatkan perekonomian dan kedaulatan Indonesia berusaha mengakhiri sengeketa dengan belanda melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 23 Agustus – 2 November 1949 yang dipimpin oleh perdana Mentri Mohammad Hatta dengan mendapatkan hasil dari KMB tersebut yaitu Belanda akan mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat yang akan dibentuk oleh Negara Republik Indonesia dengan negara-negara bagian yang sudah ada. Walaupun tidak mudah untuk mengatasi masalah sebesar ini, namun pemerintah tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

2. Indonesia mengalami permasalahan ekonomi yang cukup besar akibat perang kemerdekaan yang terjadi seperti peristiwa agresi militer Belanda yang dampaknya pada perekonomian, dimana Indonesia mengalami kekurangan penyediaan pangan karena daerah penghasil utama pertanian seperti Jawa Barat dan Jawa Timur telah dikuasai oleh Belanda, ekonomi masyarakat mengalami keterpurukan sampai-sampai masyarakat waktu itu menggunakan pakaian yang terbuat dari kain goni.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- _____, (2008). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Arsip Kementerian Penerangan No. 216. 23 Februari 1948. Laporan Interview W. Bosshard dengan Mr. Sjafruddin.
- Bloch, Marc., (1988), *Pleidooi voor de Geschiedenis of Geschiedenis Als Ambacht*. Nijmegen : Nederlandse Vertaling, SUN.
- Hutagulung R. Batara., (2010), *Serangan Umum 1 Maret 1949: Dalam Kaleidoskop Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Ismaun H., *Pengantar Belajar Sejarah Sebagai Ilmu dan Wahana Pendidikan*, (2005),

- Historia Utama Press-Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Kahin, G. M. T. (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Jakarta : Komunitas Bambu.
- Kementrian Penerangan,. (1953). *Republik Indonesia Daerah Istimewa Jogjakarta*, Djawatan Penerangan Daerah Istimewa Jogjakarta, Jakarta.
- Kuswandi, H., (2015). *Pengaruh Perang Kemerdekaan II Terhadap Pengakuan Kedaulatan RI Tanggal 27 Desember 1949*. Artefak.Vol. 3, No. 2.
- Lloyd, Christopher, (1933), *The Structures of History*. London : Basil Blackwell.
- Oey Beng To.1991. *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia*. Jakarta: LPPI
- Parera, J. D. (ed). (2005). *Sejarah Bank Indonesia Periode I: 1945-1959: Bank Indonesia Pada Masa Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia Unit Khusus Museum Bank.
- Poesponegoro, M. D., (2011). *Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesponegoro, M. D.,et al. (1993) *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Depdikbud
- Ricklefs, M.C. (1991). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rosidi Ajip. (2011). *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah SWT*. Jakarta: PT Pustaka Jaya
- Sjamsuddin, Helius,. (2007). *Metodologi Sejarah, Yogyakarta*. : Penerbit Ombak.
- Soemitro Djojohadikoesoemo. (1947). *Beberapa Soal Keoeangan*. Djakarta.